



# 2023

# LKJIP

## KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE

☎ (0971) 321977

✉ [knm.merauke@kemenkumham.go.id](mailto:knm.merauke@kemenkumham.go.id)

🌐 [kanimmerauke.kemenkumham.go.id](http://kanimmerauke.kemenkumham.go.id)

📍 Jl. TMP Trikora No. 88 Merauke



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PAPUA

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**

Jalan Taman Makam Pahlawan Trikora No. 88 Merauke

Telepon: (0971) 321977 Faksimili: (0971) 321054

Website: <https://kanimmerauke.kemenkumham.go.id> Email: [knm.merauke@kemenkumham.go.id](mailto:knm.merauke@kemenkumham.go.id)

03 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua  
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
di-  
Jayapura

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR: W.30.IMI.IMI.2-PR.03-005

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal .....

Penerima

.....

.....

NIP.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Zulhamsyah, S.Sos., M.M.

NIP. 19831225 200212 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi  
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi  
Di- Jakarta.
2. Kepala Divisi Keimigrasian  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua  
Di-Jayapura



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKJIP)

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI  
MERAUKE**

Jl. TMP Trikora No.88 Merauke, Papua  
Telp. (0971) 321977, Fax. (0971)321054  
SMS Pengaduan (081-222-667-062)

Laman: [kanimmerauke.kemenkumham.go.id](http://kanimmerauke.kemenkumham.go.id)  
Email: [knm.merauke@kemenkumham.go.id](mailto:knm.merauke@kemenkumham.go.id)

**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

COVER .....	
DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	4
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Aspek Strategis .....	7
E. Isu Strategis .....	8
F. Sistematika Laporan .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Kinerja .....	15
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Realisasi Anggaran .....	38
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	42
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	44
BAB IV PENUTUP .....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
LAMPIRAN .....	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai capaian dan evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada Tahun Anggaran 2023 secara transparan sekaligus memberikan gambaran mengenai pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Hal ini juga mendukung wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja kantor dalam kurun waktu setahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi organisasi secara umum dan khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam meningkatkan kinerja di kemudian hari.

Merauke, 03 Januari 2024

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Zulhamsyah, S.Sos., M.M.

NIP. 19831225 200212 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke kepada publik. Selain itu juga sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja kantor dalam kurun waktu setahun.

Sasaran kegiatan yang harus dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa indikator kinerja untuk pencapaian sasaran kegiatan yang dimaksud, penetapan indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif (PASTI).

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,96 Indeks	121,85%
2.	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,85 Indeks	123,00%
3.	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks	3,94 Indeks	125,88%

Pada Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke memiliki Pagu sebesar Rp. 9.224.693.000 hingga pada tanggal 31 Desember 2023 telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp. 9.180.845.914 atau sebesar 99,52%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun Anggaran 2023 sebesar 98,12.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut dalam pelaksanaan penyusunan laporan didasarkan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi mengenai capaian dan evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada Tahun Anggaran 2023 secara transparan sekaligus memberikan gambaran mengenai pengelolaan Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Selain itu, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang sesuai dengan penggunaan anggaran di tahun 2023.

#### **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian meliputi fungsi di bidang informasi dan komunikasi keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, izin tinggal keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah sebagai berikut:

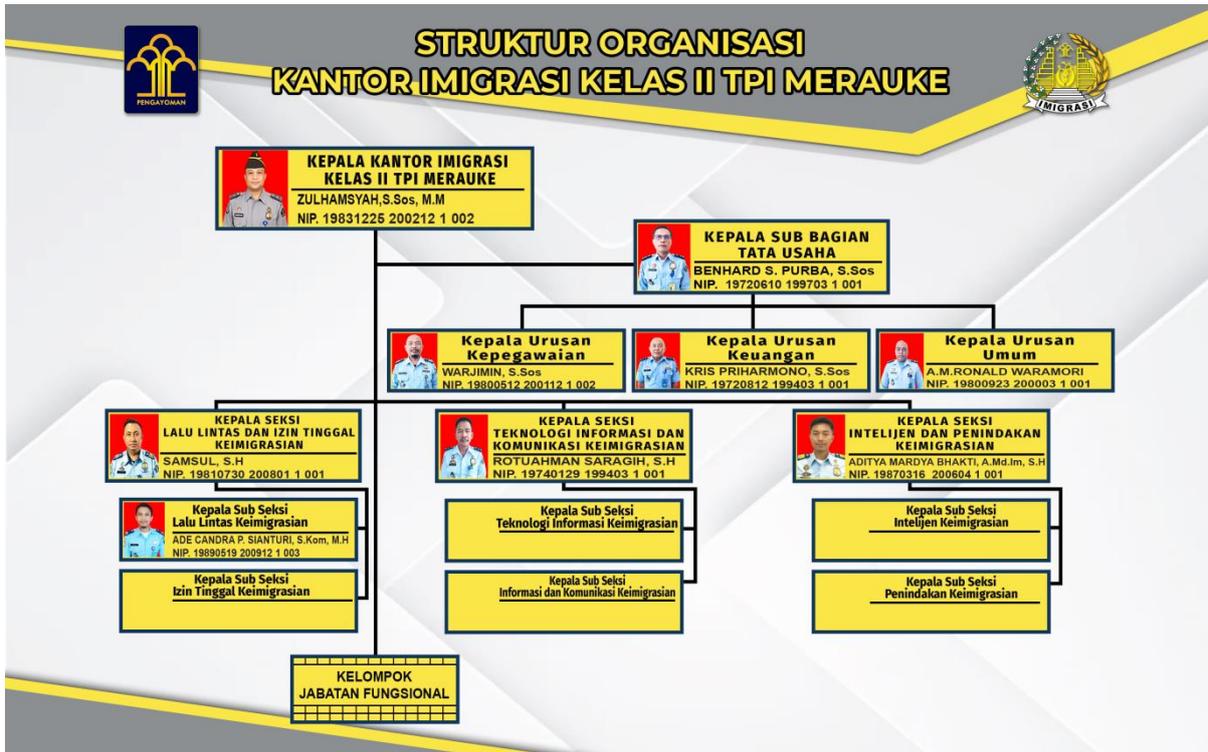
**Tugas:**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.

**Fungsi:**

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

**STRUKTUR ORGANISASI**



Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 47 pegawai:

Jenis Kelamin	Gol IV				Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah
	a	B	c	d	a	b	C	d	a	b	C	d	A	b	C	d	
Laki-laki	-	-	-	-	2	11	3	4	16	-	2	5	-	-	-	-	43
Perempuan	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	2	13	3	4	17	-	2	6	-	-	-	-	47

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam mencapai target Kinerja di Tahun 2023 yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022-2024 serta untuk memberikan informasi

kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke untuk meningkatnya kinerjanya.

#### **D. ASPEK STRATEGIS**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis vertikal di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan tidak legal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat.

Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi berupa PAS SIMPATIK, LAHARI (Layanan Paspor Dua Hari Kerja), IMMERCALL (Imigrasi Merauke Calling), CEMAS (Layanan Cemilan Gratis Bagi Pemohon), SI HELAM (Layanan Penyimpanan Helm yang Aman, JONES (Pojok Internet Gratis), KUKUPAS (Kursi Khusus Prioritas), Namek Namuk Imigrasi (Duta Pelayanan Senyum Salam Sapa), EM-SERVICE (Layanan *Emergency Service* bagi Lansia dan Orang Sakit), dan KOMPAK (Kompensasi Layanan Keimigrasian).

## E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Berikut isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke:

NO.	ISU STRATEGIS	SOLUSI
1.	Pemberian Pas Lintas Batas pada pos perbatasan tidak maksimal, dikarenakan tidak lagi strategis dan jarak pos dengan titik perlintasan yang jauh sehingga menyebabkan pelintas	Memindahkan tempat pemeriksaan lintas batas tradisional pada daerah perlintasan WN PNG dekat dengan titik perlintasan

	tidak bisa melaporkan diri di Pos Imigrasi saat melakukan perlintasan	
2.	Tidak adanya instansi yang menerbitkan dokumen perjalanan di sekitar perbatasan bagi masyarakat PNG sehingga pelintas PNG tidak memiliki dokumen perjalanan	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait PNG agar memfasilitasi masyarakat PNG dalam membuat dokumen perlintasan
3.	Banyaknya titik-titik perlintasan yang <i>illegal</i> sehingga sulit untuk melakukan pengawasan terhadap pelintas	Koordinasi dengan instansi serta aparat kampung untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing
4.	Kurangnya mobile unit untuk melakukan pelayanan <i>eazy passport</i> dan <i>booth</i> pelayanan paspor untuk pelayanan di <i>booth</i> pelayanan bagian WNI	Memfasilitasi mobile unit untuk <i>eazy passport</i> dan penambahan <i>booth</i> pelayanan paspor
5.	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kegiatan pada humas keimigrasian, seperti: belum adanya kamera yang memadai, peralatan untuk keperluan pengambilan video, laptop yang belum mumpuni, aplikasi berbayar (Canva, Photoshop) untuk keperluan media social	Memfasilitasi peralatan penunjang kegiatan humas: Telah difasilitasi kamera di bulan Desember 2023
6.	Rumah dinas dan rumah deteni yang berada di belakang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke letaknya tidak beraturan, sudah rusak dan sudah tidak layak untuk ditempati. Hal ini diakibatkan oleh bangunan yang sudah tua dan rawan banjir	Melakukan relokasi atau penataan ulang kembali bangunan yang dimaksud dan melakukan perbaikan <i>layoutnya</i> : Izin persetujuan penghapusan dari Eselon I dan KPKNL sudah keluar, selanjutnya untuk dilakukan pengajuan pelelangan.
7.	Gangguan jaringan internet yang menghambat pekerjaan yang terjadi 2 kali di Tahun 2023	Agar dapat meng- <i>upgrade</i> jenis layanan dari provider internet dengan jenis layanan internet prioritas agar tidak terlalu

		berdampak pada penurunan kualitas internet yang dilakukan oleh pihak <i>provider</i> internet dalam menjaga layanan tetap tersedia.
--	--	---

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada Tahun 2023
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada Tahun 2023

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada Tahun 2023

### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bernaung dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020-2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.

#### **VISI**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang berbunyi "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

## MISI

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan di atas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;

## TATA NILAI

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

#### 1. TATA NILAI BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

1. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif.
7. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

## 2. TATA NILAI PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks
	2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di Tahun 2023 dinyatakan berhasil. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke tahun 2023 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,96	121,85%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,85	123

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,94	125,88%
<b>Anggaran</b>		<b>Rp. 9.224.693.000</b>	<b>Rp.9.180.845.914</b>	<b>99,52%</b>

### 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah  
 Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

#### 1. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Informasi	4	3,93	3,90	3,91	3,92	3,94	3,96	3,96	3,91	3,94	4	3,96
Persyaratan	4	3,93	3,90	3,91	3,94	3,93	3,97	3,95	3,95	3,96	4	3,98
Prosedur/ Alur	3,95	3,93	3,90	3,91	3,98	3,96	3,96	3,96	4	3,96	4	3,98
Waktu Penyelesaian	3,89	3,93	3,90	3,91	3,96	3,96	3,94	3,96	3,95	3,96	3,98	3,96
Tarif/ Biaya	4	3,93	3,80	3,83	3,94	3,94	3,96	3,98	4	3,96	4	3,96
Sarana/ Prasarana	3,89	3,93	3,90	3,91	3,92	3,91	3,98	3,95	3,95	3,92	3,95	3,98
Respon	3,89	3,93	3,80	3,91	3,96	3,94	3,98	3,96	4	3,92	3,99	3,98
Konsultasi/ Pengaduan	3,95	3,93	3,80	3,91	3,94	3,94	3,96	3,96	4	3,92	3,99	3,98
<b>Nilai SKM</b>	<b>3,95</b>	<b>3,93</b>	<b>3,86</b>	<b>3,90</b>	<b>3,95</b>	<b>3,94</b>	<b>3,96</b>	<b>3,96</b>	<b>3,97</b>	<b>3,94</b>	<b>3,99</b>	<b>3,98</b>
Responden	11	9	6	7	31	67	75	78	13	29	51	33

Pada bulan Januari, Februari, Maret, April, September, dan Oktober terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30. Hal ini akan menjadi catatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada periode berikutnya.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah responden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah responden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM  
Y = Responden  
i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,96 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3,95*11)+(3,93*9)+(3,86*6)+(3,90*7)+(3,95*31)+(3,94*67)+(3,96*75)+(3,96*78)+(3,97*13)+(3,94*29)+(3,99*51)+(3,98*33))}{11+9+6+7+31+67+75+78+13+29+51+33}$$

$$= \frac{1622,29}{410}$$

$$= 3,9568 \text{ (pembulatan menjadi 3,96)}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,95
Persyaratan	3,96
Prosedur/ Alur	3,97
Waktu Penyelesaian	3,95
Tarif/ Biaya	3,96
Sarana/ Prasarana	3,94
Respon	3,96
Konsultasi/ Pengaduan	3,95
Nilai SKM	3,96
Responden	410

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah sebesar 3,96 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 121,85%.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,96}{3,25} \times 100\% = 121,85\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada tahun 2023 telah tercapai. Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi,

Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada tahun 2023 telah tercapai dan kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berada dalam kategori Sangat Baik.

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,96	121,85%	Capaian melebihi target

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada tahun 2023 sudah tercapai dan melebihi target pada perjanjian kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke terkait layanan keimigrasian yang telah diberikan berupa Layanan WNI (permohonan paspor baru, penggantian paspor, perubahan data paspor) dan Layanan WNA (perpanjangan VOA, ITK, ITAS, ITAP, kewarganegaraan ganda, perubahan status sipil, mutasi alamat, pencabutan dokim dan pengurangan data).

## 3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan	3,15	3,90	123,81%	3,20	3,97	124,06%	3,25	3,96	121,85%

Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,97 dan 2021 sebesar 3,90, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya dengan nilai rata-rata sebesar 3,96 indeks. Meskipun turun dengan angka yang tidak terlalu signifikan dikarenakan masih termasuk dalam kategori sangat baik, namun terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke masih belum stabil dan perlu dilakukan perbaikan agar dapat naik kembali di tahun selanjutnya.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021			2022			2023			Target 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,90	123,81%	3,20	3,97	124,06%	3,25	3,96	121,85%	3,30

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,96 indeks atau nilai capaian sebesar 121,85%.

#### Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,96}{[3,30]} \times 100\% = 120\%$$

#### 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2023 sebesar 3,88, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi

Kelas II TPI Merauke lebih besar 0,08 poin atau capaiannya 102,06% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke lebih besar 0,25 poin atau capaiannya 106,74% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IKM Unit di Atasnya	Capaian IKM Kanim Merauke	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	3,88	3,96	102,06%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,96	106,74%

#### 6. Penyebab Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pencapaian hasil survei diperoleh dari layanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke disebabkan oleh komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat dengan adanya layanan seperti Layanan *Eazy Passport* dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke memberikan kemudahan layanan dengan menjemput bola kepada pemohon paspor dengan cara kerja sama dengan *stakeholders* terkait seperti kantor pemerintahan yaitu Pemda Merauke, Pemda Mappi, Pemda Asma, kemudian BUMN, swasta, dan lain-lain. Selain itu, tersedia Layanan *Emergency Service* bagi Lansia dan Orang Sakit dimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke memberikan kemudahan layanan dengan menjemput bola kepada pemohon paspor yang kesulitan untuk datang secara langsung ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Selain itu, terdapat juga layanan paspor simpatik yang dilakukan di luar hari kerja yang dilakukan secara berkala.



*Petugas saat melaksanakan layanan Paspor Simpatik*



*Petugas saat melaksanakan kegiatan Eazy Passport di Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merauke*

## 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah*

### 1. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\textit{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\textit{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (*e-survey*) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 12.

Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.

Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	4
2	Penyidikan	10	4
3	TAK	10	4
4	Pengawasan	20	4
5	Pengaduan	20	4
6	Pencegahan	20	4

*Unsur Survei Pihak Internal*

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,73
2	Penyidikan dan TAK	20	3,73
3	Pengawasan	20	3,87
4	Pengaduan	20	3,60
5	Pencegahan	20	3,60

*Unsur Survei Pihak Eksternal*

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 12 Responden (khususnya: 6 responden internal dan 6 responden eksternal) dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke sebesar 4 Indeks untuk responden internal dan 3,71 responden untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{(4 \times 6) + (3,71 \times 6)}{12} = \frac{44,26}{12} \\
 &= 3,85
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke sebesar 3,85. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 123%.

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,85}{3,13} \times 100\% = 123\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada tahun 2023 telah tercapai.

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	2.Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,85	123	Capaian melebihi target

Pada Tahun 2023 realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah 3,85 dengan grade A atau sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengamanan di wilayah diukur dari nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada tahun 2023 sudah tercapai dan melebihi target pada perjanjian kinerja.

## 3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,71	119,29	3,12	3,82	122,43	3,13	3,85	123

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi Indeks Pengamanan keimigrasian tahun 2022 sebesar 3,82 dan 2021 sebesar 3,71, dan 3,85 indeks di Tahun 2023. Indeks Pengamanan keimigrasian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mengalami peningkatan yang konsisten, sehingga diharapkan untuk dapat mempertahankan dan kalau bisa ditingkatkan di periode berikutnya.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021			2022			2023			Target 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,71	119,29	3,12	3,82	122,43	3,13	3,85	123	3,14

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,85 indeks atau nilai capaian sebesar 123%.

**Capaian kinerja di banding target jangka menengah:**

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IPK Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,85}{3,14} \times 100\% = 123$$

#### 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2023 sebesar 3,60, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke lebih besar 0,25 poin atau capaiannya 106,94% dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke lebih besar 0,14 poin atau capaiannya 103,77% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit di Atasnya	Capaian IPK Kanim Merauke	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian	3,60	3,85	106,94%

	Hukum dan HAM Papua			
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,85	103,77%

## 6. Penyebab Keberhasilan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke secara rutin melakukan penyidikan dan pengawasan untuk mendeteksi adanya pelanggaran keimigrasian yang mengancam kedaulatan negara, dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) bekerja sama dengan *stakeholders* terkait, seperti: TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Disdukcapil, Kesbangpol, dan instansi lainnya. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing seperti Tenaga Kerja Asing, Pengungsi/Pencari Suaka dan Penjamin Virtual Orang Asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.





Dari kiri ke kanan: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Pj. Gubernur Papua Selatan, dan Kepala Divisi Keimigrasian Papua dalam kegiatan Pembentukan TIMPORA Tingkat Provinsi Papua Selatan

### 3 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

*Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*

#### 1. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
<b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>												
Transparansi	98,77	98	99,33	97,31	99,36	99,07	98,48	99,05	97,92	99,55	97,98	98,55
Menerima Imbalan	98,77	98	99,33	96,77	99,36	99,07	98,99	98,57	98,44	99,10	97,98	98,55
Perlakuan yang sama	98,77	98,67	99,33	97,85	99,36	98,61	98,99	98,57	98,44	98,65	97,98	98,55
Prosedur	98,77	98,67	99,33	97,31	99,36	99,07	98,99	99,05	98,44	99,10	97,47	98,55
Privasi Pelapor	98,77	98,67	99,33	97,31	99,36	99,07	98,99	99,05	97,92	99,10	97,47	98,55
Proses Pelanggaran	98,77	98,67	99,33	97,31	99,36	99,07	98,99	98,57	98,44	98,65	98,48	98,55
Pencegahan Korupsi	98,77	98	98,67	97,31	98,72	99,07	98,99	98,57	98,44	98,65	97,47	97,83
<b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>												
Penerimaan Pegawai	98,77	98	98,67	96,77	98,72	99,07	97,98	98,57	98,44	99,10	98,48	97,10
Penempatan	98,77	98,67	98,67	97,31	99,36	99,07	98,48	98,57	98,44	99,10	98,48	97,83
Promosi Jabatan	98,77	98,67	98,67	97,31	99,36	99,07	98,48	98,57	98,44	99,10	98,48	98,55
Pengembangan Kompetensi	98,77	98,67	98,67	96,77	99,36	99,07	98,48	98,57	98,44	99,10	98,48	97,83
Kenaikan Pangkat	98,77	98,67	98,67	97,85	98,72	99,07	98,48	98,57	98,44	99,10	98,99	98,55
Gaji	97,53	98,67	98	97,31	99,36	99,07	98,48	98,57	98,44	99,10	98,48	98,55
Presensi Pegawai	98,15	98	98,67	97,85	99,36	99,07	97,47	98,57	98,44	98,65	97,98	98,55
<b>C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran</b>												
Perjalanan Dinas	98,77	97,33	98	96,77	99,36	99,07	97,98	98,10	97,92	98,65	97,98	98,55
PBJ	98,77	97,33	98	95,7	99,36	99,07	98,48	98,10	97,92	98,65	98,48	98,55
Honorarium	98,77	98	98,67	97,31	99,36	99,07	97,98	98,57	98,44	98,2	98,48	98,55
Bukti Transaksi	98,77	98	98	96,77	99,36	99,07	97,98	98,57	97,92	98,65	98,48	97,83
<b>D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma</b>												
Tanggung jawab	98,77	97,33	98	97,31	99,36	99,07	98,48	98,1	98,44	99,1	98,48	98,55
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98,77	98,67	97,33	97,31	99,36	99,07	98,48	98,57	98,96	99,55	98,48	97,83
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98,77	98,67	98	97,31	99,36	99,07	97,98	99,05	98,44	99,55	98,48	97,83
Kode Etik	98,77	98,67	97,33	97,31	99,36	98,61	97,98	98,57	98,96	99,10	98,48	97,83

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Nilai Integritas	98,70	98,21	98,41	97,14	99,29	99,03	98,38	98,56	98,37	98,97	98,29	98,24
Skala Likert	3,95	3,93	3,94	3,88	3,97	3,96	3,93	3,94	3,93	3,96	3,93	3,93
Responden	27	25	25	31	26	36	33	35	32	37	33	23

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah responden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah responden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai IKI  
 Y = Responden  
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai IKI selama tahun 2023 sebesar 3,94 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3,95*27)+(3,93*25)+(3,94*25)+(3,88*31)+(3,97*26)+(3,96*36)+(3,93*33)+(3,94*35)+(3,93*32)+(3,96*37)+(3,93*33)+(3,93*23))}{27+25+25+31+26+36+33+35+32+37+33+23}$$

$$= \frac{1429,41}{363}$$

$$= 3,9377 \text{ (pembulatan menjadi 3,94)}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	98,62
Menerima Imbalan	98,58
Perlakuan yang sama	98,62
Prosedur	98,67
Privasi Pelapor	98,62
Proses Pelanggaran	98,67
Pencegahan Korupsi	98,39

Unsur Layanan	Nilai
Penerimaan Pegawai	98,35
Penempatan	98,58
Promosi Jabatan	98,62
Pengembangan Kompetensi	98,53
Kenaikan Pangkat	98,67
Gaji	98,48
Presensi Pegawai	98,39
Perjalanan Dinas	98,21
PBJ	98,21
Honorarium	98,44
Bukti Transaksi	98,30
Tanggung jawab	98,44
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98,58
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	98,58
Kode Etik	98,44
<b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b>	<b>98,48</b>
Skala Likert	3,94
Responden	363

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{98,48}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah sebesar 3,94 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 125,88%.

Capaian IKI:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ & = \frac{3,94}{3,13} \times 100\% = 125,88\% \end{aligned}$$

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,94	125,88%	Capaian melebihi target

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan target dan realisasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, dimana diperoleh hasil realisasi 3,94 dari target 3,13 indeks. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada tahun 2023 telah tercapai dan melebihi target pada perjanjian kinerja.

## 3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,87	124,44%	3,12	3,93	125,96%	3,13	3,94	125,88%

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,93 dan 2021 sebesar 3,87, realisasi Indeks Kepuasan Internal di tahun 2023 mengalami kenaikan 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya dengan 3,94 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mengalami peningkatan yang konsisten, sehingga diharapkan untuk dapat mempertahankan dan kalau bisa ditingkatkan di periode berikutnya.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021			2022			2023			Target 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,87	124,44%	3,12	3,93	125,96%	3,13	3,94	125,88%	3,14

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,94 indeks atau nilai capaian sebesar 125,88%.

**Capaian kinerja dibanding target jangka menengah:**

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,94}{3,14} \times 100\% = 125,48\%$$

**5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun 2023 sebesar 3,80, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke lebih besar 0,14 poin atau capaiannya 102,06% jika dibandingkan dengan bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Direktorat Jenderal imigrasi sebesar 3,90, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke lebih besar 0,04 poin atau capaiannya 101,02% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IKI Unit di Atasnya	Capaian IKI Kanim Merauke	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	3,80	3,94	103,68%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,90	3,94	101,02%

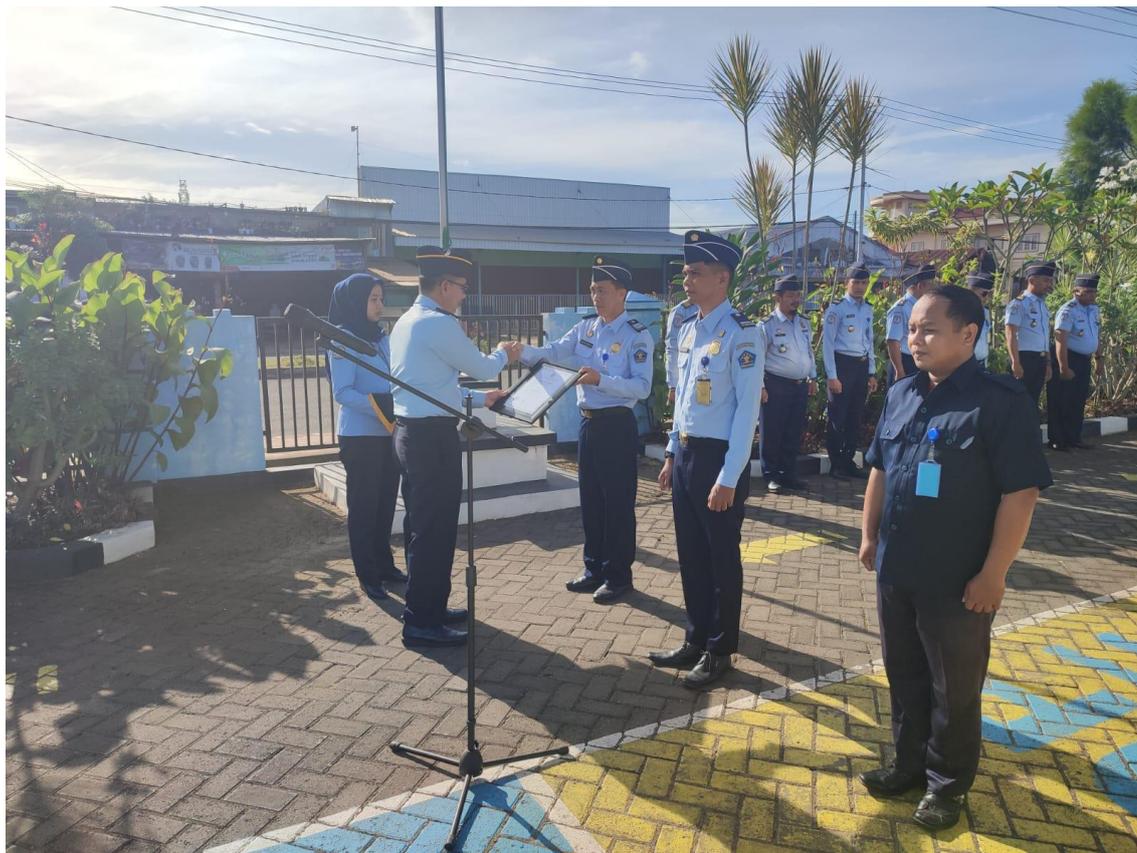
**6. Penyebab Keberhasilan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah**

Keberhasilan capaian kinerja di tahun 2023 didukung oleh peningkatan layanan internal yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dengan adanya peningkatan rapat internal

kantor, komitmen untuk selalu menjaga kekompakan oleh semua pegawai dan *reward* berupa penghargaan yang diberikan terhadap pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang telah bekerja dengan kinerja yang baik.



*Pemberian Penghargaan terhadap pegawai yang berkinerja baik*



*Pemberian Penghargaan terhadap pegawai yang berkinerja baik*



*Pemberian Penghargaan terhadap Pegawai PPNPN yang berkinerja baik*

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke pada Tahun Anggaran 2023:

### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke memiliki Pagu sebesar Rp. 9.224.693.000 hingga pada tanggal 31 Desember 2023 telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp. 9.180.845.914 atau sebesar 99,52% dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.250.915.000</b>	<b>Rp. 2.249.802.989</b>	<b>99,95%</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.250.915.000	Rp. 2.249.802.989	99,95%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.973.778.000</b>	<b>Rp. 6.931.042.925</b>	<b>99,39%</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.973.778.000	Rp. 6.931.042.925	99,39%
<b>Total</b>	<b>Rp. 9.224.693.000</b>	<b>Rp. 9.180.845.914</b>	<b>99,52%</b>

Sumber: Satu DJA (realisasi berdasarkan giat)

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 2.917.722.000	Rp. 2.886.544.214	98,93%
Belanja Barang	Rp. 5.413.395.000	Rp. 5.403.435.200	99,82%
Belanja Modal	Rp. 893.576.000	Rp. 890.866.500	99,70%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 9.224.693.000</b>	<b>Rp. 9.180.845.914</b>	<b>99,52%</b>

Sumber: OMSPAN (realisasi belanja berdasarkan sumber dana)

## 2. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp. 8.512.949.000	Rp. 9.733.705.000	Rp. 9.224.693.000
Realisasi	Rp. 6.923.190.380	Rp. 9.345.522.781	Rp. 9.180.845.914
<b>Capaian</b>	81,33%	96,01%	99,52%

Sumber: OMSPAN (realisasi belanja berdasarkan sumber dana)

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.300.108.000	Rp. 3.035.207.663	63,91	Rp. 3.190.297.000	Rp. 3.172.601.843	99,45
Belanja Barang	Rp. 4.850.841.000	Rp. 3.535.837.505	88,47	Rp. 5.718.408.000	Rp. 5.433.876.688	95,02
Belanja Modal	Rp. 362.000.000	Rp. 352.145.212	61,17	Rp. 825.000.000	Rp. 739.044.250	89,58
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 8.512.949.000</b>	<b>Rp. 6.923.190.380</b>	<b>81,33</b>	<b>Rp. 9.733.705.000</b>	<b>Rp. 9.345.522.781</b>	<b>96,01</b>

Sumber: OMSPAN (realisasi belanja berdasarkan sumber dana)

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 2.917.722.000	Rp. 2.886.544.214	98,93%
Belanja Barang	Rp. 5.413.395.000	Rp. 5.403.435.200	99,82%
Belanja Modal	Rp. 893.576.000	Rp. 890.866.500	99,70%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 9.224.693.000</b>	<b>Rp. 9.180.845.914</b>	<b>99,52%</b>

Sumber: OMSPAN (realisasi belanja berdasarkan sumber dana)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan realisasi anggaran dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 realisasi mencapai 99,52% atau sebesar 9.180.845.914. Hal ini didukung oleh perencanaan anggaran yang baik yang memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran, proses pelaksanaan yang baik dengan pelaksanaan

kegiatan sesuai target yang ditetapkan dan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap serapan anggaran. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien yang memiliki manfaat dan akan berpengaruh pada proses penyerapan anggaran.

### Realisasi Capaian PNBP

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke tahun 2023 sebesar Rp.373.300.000 dengan realisasi per 31 Desember 2023 mencapai **Rp. 1.034.750.000** dan melebihi capaian sebesar 277,19% dari target yang telah ditetapkan. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2023:

#### REALISASI PNBP KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2021 s.d 2023

(dalam Rupiah)

NO	JENIS	REALISASI		
		2021	2022	2023
<b>DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>				
1.	PASPOR BIASA 48 HALAMAN	80.850.000	362.250.000	601.650.000
2.	PASPOR BIASA 48 HALAMAN ELEKTRONIK			87.100.000
3.	SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WNI			
4.	SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING			
5.	LAYANAN PERCEPATAN PASPOR SELESAI PADA HARI YANG SAMA			36.000.000
<b>VISA KUNJUNGAN</b>				
1.	VISA KUNJUNGAN SEKALI PERJALANAN			
2.	VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN DIHTUNG PERTAHUN			
3.	VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN			72.000.000
<b>VISA TINGGAL TERBATAS</b>				
4.	VISA TINGGAL TERBATAS			
5.	VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN			
<b>PERSETUJUAN VISA DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI</b>				
6.	PERSETUJUAN VISA DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI			

1.	PEMBERIAN IZIN KUNJUNGAN MASA BERLAKU 30 HARI			
2.	PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN MASA BERLAKU 30 HARI	8.500.000	8.500.000	2.000.000
3.	PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN MASA BERLAKU 60 HARI			
4.	IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MASA BERLAKU PALING LAMA 60 HARI (PMK NO.09/PMK.02/2022)		36.000.000	40.000.000
4.	IZIN TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN			
5.	IZIN TINGGAL TERBATAS MASA BERLAKU PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN	2.000.000	1.000.000	3.000.000
6.	IZIN TINGGAL TERBATAS MASA BERLAKU PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN	60.000.000	87.000.000	82.500.000
7.	IZIN TINGGAL TERBATAS MASA BERLAKU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN	4.000.000	2.000.000	8.000.000
8.	IZIN TINGGAL TERBATAS KHUSUS MASA BERLAKU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN KHUSUS PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)			
9.	PERSETUJUAN IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK PEKERJA DI PERAIRAN INDONESIA			
10.	TERAAN IZIN TINGGAL TERBATAS UNTUK PEKERJA DI PERAIRAN INDONESIA			1.200.000
11.	PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN			
12.	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN			
13.	PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK TERBATAS	20.400.000		
<b>IZIN MASUK KEMBALI</b>				
14.	IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN	1.200.000	600.000	4.200.000
15.	IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN	41.000.000	59.000.000	59.000.000
16.	IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN	15.750.000	7.000.000	10.500.000
17.	IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN KHUSUS PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)			
<b>BIAYA BEBAN</b>				
1.	ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60 (ENAM PULUH) HARI DARI IZIN KEIMIGRASIAN YANG DIBERIKAN	3.000.000	1.000.000	

2.	PENANGGUNGJAWAB ALAT ANGKUT YANG TIDAK MEMENUHI PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN			
3.	PENANGGUNGJAWAB ALAT ANGKUT YANG MENGANGKUT PENUMPANG YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN YANG SAH DAN BERLAKU			
4.	BIAYA BEBAN PASPOR HILANG	1.000.000	13.000.000	27.000.000
5.	BIAYA BEBAN PASPOR RUSAK			
6.	BIAYA BEBAN KARTU IZIN TINGGAL TETAP HILANG			
7.	BIAYA BEBAN KPP APEC HILANG/RUSAK			
<b>SMART CARD</b>				
8.	SMART CARD			
<b>ABTC</b>				
9.	PERMOHONAN BARU KPP APEC			
10.	PENGGANTIAN KPP APEC			
<b>AFFIDAVIT</b>				
11.	FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA			
<b>SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN</b>				
12.	SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN			
<b>PNBP UMUM</b>				
13.	PENDAPATAN DAN PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN		400.000	
14.	PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU			600.000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>237.700.000</b>	<b>577.750.000</b>	<b>1.034.750.000</b>

## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. SMART

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam

rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

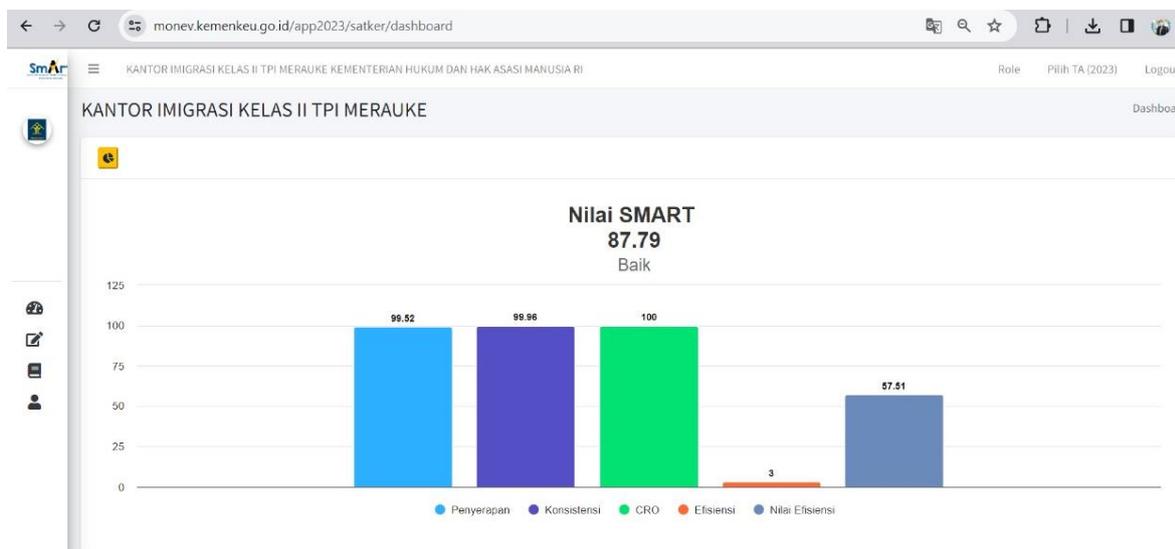
1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	85,17	81,33	93,27	75,79	18,24	95,6
2	2022	89,47	96,01	99,31	100	5,98	64,96
3	2023	87,79	99,52	99,96	100	3	57,51

Sumber: Dashboard pada aplikasi SMART

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART pada tabel di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke sebesar 87,79 pada tahun 2023 dan termasuk dalam kategori Baik.



## 2. IKPA

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

### IKPA T.A. 2023

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	068	013	408284	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	Nilai	100.00	84.45	100.00	97.00	100.00	99.74	100.00	100.00	98.12	100%	98.12
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.45	20.00	9.70	10.00	9.97	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	92.23		99.35					100.00			

Sumber: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi OMSPAN

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah sebesar 98,12%. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dikategorikan sangat baik karena berada pada *range* nilai lebih dari 95.

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di tahun 2023:

##### 1. E-Performance

*E-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja

unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Penginputan dilakukan setiap bulannya dengan menginput capaian kinerja yang terealisasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Aplikasi *e-performance* ini dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Adapun capaian *e-performance* Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Capture Capaian E-Performance Tahun 2023

Hal Kantor Imigrasi Merauke, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Rabu, 20 Desember 2023 | 09:01:44 WIB

Home

TAHUN: 2023 | Tabulasi Pengukuran Kinerja | KANTOR WILAYAH PAPUA | Tampilkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	REALISASI	CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(%)
521204	KANTOR IMIGRASI KELAS II MERAUKE		TW1						1		2	3
			TW2						1		2	3
			TW3						1		2	3
			TW4						1		2	3

Tabulasi pengukuran kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Merauke

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2023

UNIT KERJA: KANTOR IMIGRASI KELAS II MERAUKE

Tampilkan Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN : 2023  
KANTOR IMIGRASI KELAS II MERAUKE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(%)	
			KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	LIBAAN	LAMPIRAN				
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	4	1	3.25	Indeks	TW1	3.25	Indeks	3.91	120		0	0

Libaian: 120  
 Keterangan: Dalam rangka mempersiapkan Hari Bhakti Imigrasi ke-73 Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke telah melaksanakan Layanan Paspor Simpel, kegiatan Donor Darah di PMI Merauke, kegiatan Imigrasi Berbahas "Membersihkan Rumah Badan" di Gereja Masehi Adven, Kib. Merauke, upacara Zarah Makam dan Tabur Bunga yang bertempat di TMP "Tilora Merauke dan kegiatan Imigrasi Berbahas "Tanjungan Panti Sosial" yang bertempat di Panti Jompo dan Panti Alunan Anak Negeri Bhakti Luhur St. Vincentius Keuskupan Agung Merauke - Kegiatan Deklarasi Penanganan Zona Imigrasi Menuju WSK/WSEM Februari: Kegiatan senam sehat seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP)

<span>Home</span> <span>Dashboard</span> <span>BSC</span> <span>Input Data</span> <span>Perencanaan</span> <span>Realisasi</span> <span>Lainnya</span> <span>Ubah Password</span> <span>Keluar</span>										
									<p>Marek: Tercepat pemeliharaan Jaringan SKL SMPCS (Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cebel System) yang menyebarkan terganggunya jaringan di Merauke sehingga penyiapan pengujian pemohonan Paspor RI melalui Aplikasi M-Paspor ditadatkan untuk sementara dan pengujian pemohonan dilakukan secara walk-in sejak 01 Maret 2023 hingga jaringan kembali normal</p>	
TW2	3.25	Indeks	3.93	121					<p>April: Piket pengamanan dan pelayanan pendaftaran keimigrasian pada masa perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan Cup Bersama di Tahun 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berjalan dengan baik</p> <p>Mai: Tindakan dilaksanakan Medical Check Up (MCU) kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke - Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Moral dan Rohani dengan Tausyiah dan ibadah dikumpulkan pada seluruh pegawai kantor, Juni: Pelaksanaan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berjalan baik, arahan dan larasir dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diutamakan.</p>	
TW3	3.25	Indeks	3.96	122					<p>Juli: Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mengikuti kegiatan In House Training yang dilaksanakan bersama narasumber dari Bank BNI - Terseleksi sebagai jalan sehat, senam bersama dan donor darah yang diikuti oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-78 dan HKMD Kemerdekaan RI ke-78</p> <p>Agustus: Telah dilakukan kegiatan Ziarah dan Tabur bunga dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 dan HKMD ke-78 pada tanggal 09 Agustus 2023 - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke turut memantapkan kampanye dan pawai pembangunan di Kabupaten Merauke pada tanggal 11 Agustus 2023</p> <p>September: Tercepat gangguan jaringan SKL SMPCS (Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cebel System) yang menyebarkan terganggunya jaringan di Merauke sehingga penyiapan pengujian pemohonan Paspor RI melalui Aplikasi M-Paspor ditadatkan untuk sementara dan pengujian pemohonan dilakukan secara walk-in sejak 16</p>	

<span>Home</span> <span>Dashboard</span> <span>BSC</span> <span>Input Data</span> <span>Perencanaan</span> <span>Realisasi</span> <span>Lainnya</span> <span>Ubah Password</span> <span>Keluar</span>												
									<p>dilakukan secara walk-in sejak 16 September 2023 hingga jaringan kembali normal</p>			
									<p>Oktober: Telah dilaksanakan Peternakan dan Pengambilan Sampah Pegawai Administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Oktober 2023 dan telah dilakukan senam Terseleksi oleh Pj. Kepala Kantor Imigrasi Albertus Santani Ferat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang baru, Zuharnainy pada tanggal 20 Oktober 2023</p> <p>November: Dilakukan studi tuis pada Kantor Kelas II Non TPI Bidad pada tanggal 05 - 11 November 2023</p> <p>Desember:</p>			
	4	2	Indeks Pengamanan Kewarganegaraan di Wilayah	3.13 Indeks	TW1	3.13	Indeks	3.13	100	<p>Januari: Kegiatan tuis Inteladkim: Penyelidikan Kegiatan tuis Lalinadkim: Clearance - Pemeriksaan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan MAM, Kabupaten Mappi, Monitoring Perlintasan Batas pada Pos Imigrasi Perbatasan Wengku kegiatan tuis Taim: Melaksanakan Easy Passport di Sekretariat Dharma Wanita Persewaan Kab. Merauke sebanyak 8 (delapan) orang dan di kediaman pribadi pemohon sebanyak 5 (lima) orang</p> <p>Februari: Kegiatan tuis Inteladkim: Penyelidikan sebanyak 1 kali, Operasi Mandiri sebanyak 2 kali kegiatan tuis Lalinadkim: Clearance - Pemeriksaan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Mera, Kabupaten MAM kegiatan tuis Taim: Melaksanakan Easy Passport di Puskesmas Mappih Baru sebanyak 2 (dua) orang dan di Sekretariat Dharma Wanita Persewaan Kab. Merauke sebanyak 5 (lima) orang</p> <p>Sosialisasi aplikasi M-Paspor di SMA VPK Merauke dan media elektronik melalui siaran radio Pro 1 FM 880 Merauke</p> <p>Marek: Kegiatan tuis Inteladkim: Tim PORA dan Operasi Gabungan Kegiatan tuis Lalinadkim: Penyisihan 240 Pas Lintas Batas di wilayah Perbatasan Hegera RI-PNG di Distrik Wengko dan Hegera, Kab. Boven Digoel Kegiatan tuis Taim: Sosialisasi aplikasi M-Paspor dan sosialisasi keadilan di SMA VPK, kelas X dan XI Merauke, Sosialisasi pada instansi pemerintahan di Kab. Boven Digoel</p>	0	0

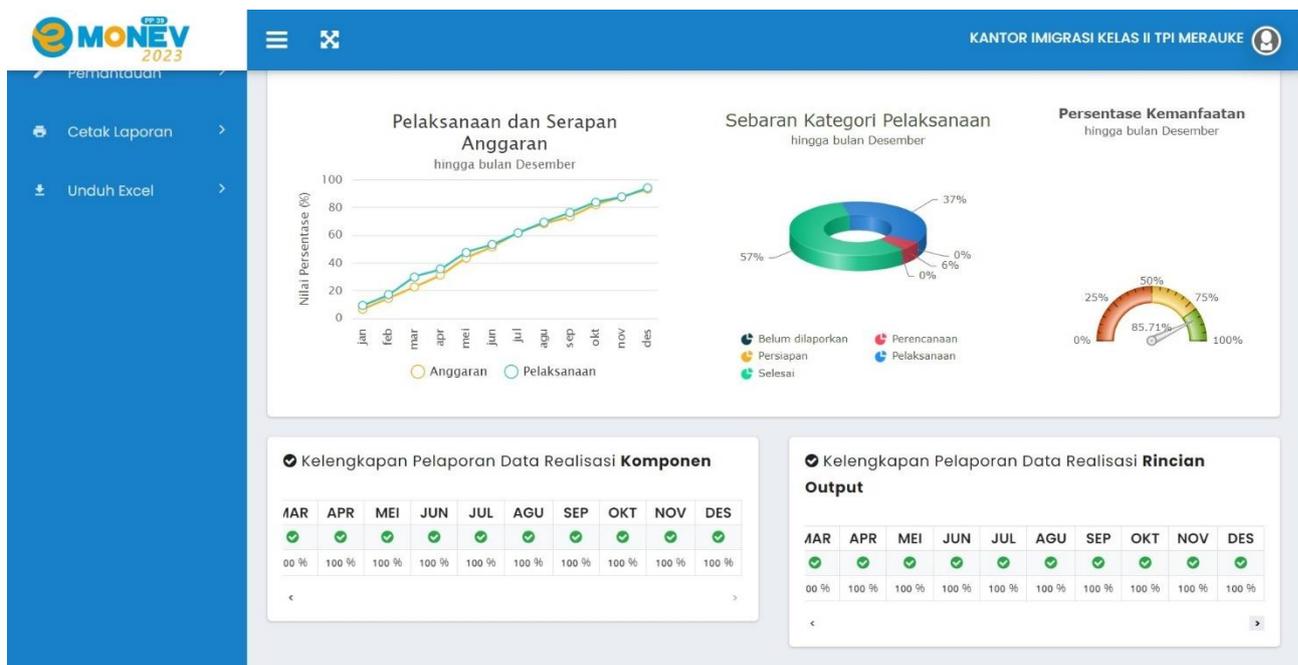
<span>Home</span> <span>Dashboard</span> <span>BSC</span> <span>Input Data</span> <span>Perencanaan</span> <span>Realisasi</span> <span>Lainnya</span> <span>Ubah Password</span> <span>Keluar</span>											
									<p>April: Kegiatan tuis Inteladkim: Penyelidikan sebanyak 1 kali dan Kegiatan tuis Lalinadkim: Melaksanakan Easy Passport di Kantor Kewarganegaraan Kabupaten Armat dan PT. Perdana Travel Kabupaten Merauke</p> <p>Kegiatan tuis Taim: Sosialisasi aplikasi M-Paspor dan sekolah kedinasan Kemerdekaan dengan Dialog Interaktif melalui Radio Pro 1 FM 90,3 MHz RRI Boven Digoel</p> <p>Juni: Kegiatan Tuis Lalinadkim: Telah dilaksanakan Clearance In terhadapp Kapal MFI Green Star di Pelabuhan Mera</p> <p>Kegiatan Tuis Taim: Telah dilaksanakan Layanan Paspor Kolektif Easy Passport di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Telah dilakukan sosialisasi Aplikasi M-Paspor dan seluruh kedinasan Kemerdekaan di SMA N 02 dan SMA N 03 Merauke Kegiatan tuis Inteladkim: Terseleksi sebagai Paspor Koordinator Tim PORA di Kabupaten Mappi</p> <p>Dilakukan Pengawasan Keberangkatan Pendudukan atas 9 WNA dari Papua New Guinea (PNG) melalui PNPB Sota</p>		
TW2	3.13	Indeks	3.13	100					<p>Agustus: Kegiatan Tuis Lalinadkim: - Telah dilaksanakan Clearance In pesawat jet dengan nomor penitahan W/F 602 pada tanggal 04 Agustus 2023 - Terseleksi sebagai Layanan Paspor Merah dan Pas Lintas Batas Merauke dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 dan HKMD ke-78 pada tanggal 04 Agustus 2023 Kegiatan Tuis Taim: Telah dilakukan sosialisasi Aplikasi M-Paspor dan seluruh kedinasan Kemerdekaan di SMA VPK Petrus Hoberboer Mindigane pada tanggal 04 Agustus 2023</p> <p>September: Kegiatan Tuis Inteladkim: Telah dilaksanakan inspeksi kondisional TPI/OSA tingkat Kabupaten Armat pada tanggal 05-08 September 2023</p>		
TW3	3.13	Indeks	3.13	100					<p>Juli: Kegiatan Tuis Lalinadkim: Telah dilaksanakan Clearance In pesawat Hercules dan Kapal Putih Black Cat di Merauke Kegiatan Tuis Taim: Telah dilakukan sosialisasi Aplikasi M-Paspor dan seluruh kedinasan Kemerdekaan di SMA N 02 dan SMA Negeri Plus Satu Atap 1 Merauke</p> <p>Agustus: Kegiatan Tuis Lalinadkim: - Telah dilaksanakan Clearance In pesawat jet dengan nomor penitahan W/F 602 pada tanggal 04 Agustus 2023 - Terseleksi sebagai Layanan Paspor Merah dan Pas Lintas Batas Merauke dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 dan HKMD ke-78 pada tanggal 04 Agustus 2023 Kegiatan Tuis Taim: Telah dilakukan sosialisasi Aplikasi M-Paspor dan seluruh kedinasan Kemerdekaan di SMA VPK Petrus Hoberboer Mindigane pada tanggal 04 Agustus 2023</p> <p>September: Kegiatan Tuis Inteladkim: Telah dilaksanakan inspeksi kondisional TPI/OSA tingkat Kabupaten Armat pada tanggal 05-08 September 2023</p>		

<span>Home</span> <span>Dashboard</span> <span>BSC</span> <span>Input Data</span> <span>Perencanaan</span> <span>Realisasi</span> <span>Lainnya</span> <span>Ubah Password</span> <span>Keluar</span>														
						TW4	3.13	Indeks	3.13	100	Oktober - Kegiatan Tusi Lemahule - Pelayanan Paspor Elektronik telah bisa dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke - Sosialisasi Tugan dan Fungsi Keimigrasian dalam kegiatan non fisik (MMO) - Pengambilan data pemohon buku PLB oleh Petugas Pos Imigrasi Waropko - Pengawasan 73 orang WN PFG yang melakukan ibadah Sana Maria Fatu Rosario di Gereja Katolik Distrik Waropko - Telah dilaksanakan Clearanor Dut Kapal MW La Laperouse di Perikanan Pelabuhan Asmat Kegiatan Tusi Tikim - Telah dilaksanakan Sosialisasi Maspaspor dan pengamatan sekolah keclinatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI di SMK Hegeri 1 Merauke pada tanggal 10 Oktober 2023, SMA Hegeri 2 pada tanggal 14 Oktober 2023 dan SMA Hegeri Aski Kab. Goven Dipone pada tanggal 20 Oktober 2023 Kegiatan Tusi Intedekim - Telah dilaksanakan Depotasi 1 WN Asli Indo yang telah meninggal Fase 122 kaur/Bju Fase 75 ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada tanggal 05 Oktober 2023 - Telah dilaksanakan TM PDRA tingkat distrik di Mandobo pada tanggal 16 - 19 Oktober 2023 November - Kegiatan Tusi Tikim - Press Release 4 WN PFG yang masuk lewat PLBN Kota tanpa menggunakan dokumen keimigrasian Kegiatan Tusi Intedekim - Penangkapan atas 4 WN PFG yang masuk lewat PLBN Kota tanpa menggunakan dokumen keimigrasian, yaitu: 1. Melu Kana (44 Tahun) 2. Blau Dioni (20 Tahun) 3. Dinda Mense (25 Tahun) 4. Masag Aniba (34 Tahun) - Pembentukan TM PDRA tingkat Provinsi Papua Selatan - Operasi gabungan tingkat Provinsi Papua Selatan Desember - Kegiatan Tusi Intedekim: Depotasi 10 WN PFG melalui PLBN Yemiten pada tanggal 03 s.d 06 Desember 2023 Depotasi 2 WN PFG melalui PLBN Kota pada tanggal 19 Desember 2023			
5.	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	5 1	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.13 Indeks Tiwulan IV	TW1	3.13	Indeks	3.91	125	Januari - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Januari dengan 11 responden Februari - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Februari dengan 9 responden Maret - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Maret dengan 6 responden			
						TW2	3.13	Indeks	3.92	128	April - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) April dengan 7 responden Mei - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Mei dengan 31 responden			
5.	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	5 1	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.13 Indeks Tiwulan IV	TW1	3.13	Indeks	3.91	128	Januari - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Januari dengan 11 responden Februari - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Februari dengan 9 responden Maret - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Maret dengan 6 responden			
						TW2	3.13	Indeks	3.92	128	April - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) April dengan 7 responden Mei - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Mei dengan 31 responden Juni - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Juni dengan 63 responden			
						TW3	3.13	Indeks	3.97	127	Juli - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Juli dengan 75 responden Agustus - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Agustus dengan 78 responden September - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) September dengan 13 responden			
						TW4	3.13	Indeks	7.96	254	Oktober - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) Oktober dengan 29 responden November - Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) November dengan 51 responden			

Sumber: Data Perjanjian dan Realisasi Kinerja pada aplikasi e-Performance Kemenkumham

## 2. E-Monev Bappenas

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS dapat diakses melalui laman <http://e-monev.bappenas.go.id>. Adapun capaian *e-Monev* Bappenas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



### 3. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun pelaporan capaian Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke disusun dan dilaporkan ke Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Papua. Berikut Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di Tahun 2023:

**TARGET KINERJA**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	KET / LAMPIRAN
1.	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	Diimplementasikannya layanan Paspor Online pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor Online secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	1. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor Online 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi	1. Laporan uji coba pelaksanaan paspor online 2. Laporan sosialisasi Paspor Online: - Surat Perintah Tugas Nomor:W.30.IMI.IMI.2.UM.01.01-0302 - Laporan sosialisasi M-Paspor di SMK SMA YPK Merauke - Surat Perintah Tugas Nomor: W.30.IMI.IMI.2.UM.01.01-0314 - Laporan sosialisasi layanan M-Paspor melalui RRI Merauke - Surat Perintah Tugas Nomor: W.30.IMI.IMI.2.UM.01.01-0344 - Laporan sosialisasi M-Paspor pada SMA Yoanes XXIII Merauke - Surat Perintah Tugas Nomor: W.30.IMI.IMI.2.UM.01.01-0352 - Surat undangan kegiatan sosialisasi Paspor Online (M-
					Paspor) dan Sekolah Kedinasan pada Kemenkumham RI di Kabupaten Boven Digoel Nomor: W.30.IMI.IMI.2-GR.04.02-0347 - Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengenalan Sekolah Kedinasan pada Kemenkumham RI di Kabupaten Boven Digoel 3. Uji coba kesisteman
2.	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan Pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	1. Pembentukan tim klasifikasi SDM 2. Pembentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected) 3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	1. SK Tim Klasifikasi SDM Nomor: W.30.IMI.IMI.2-GR.04.02-486 Tahun 2023 2. Tabel Klasifikasi SDM Pendataan Pengungsi Luar Negeri 3. Tabel Pendataan Pengungsi Luar Negeri 4. Daftar SDM yang terklasifikasi untuk mengikuti pelatihan
3.	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Terpatutnya regulasi penjamin orang asing oleh penjamin dan orang asing	Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing	1. Pembentukan tim pendataan penjamin orang asing 2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas dan fungsi memerlukan keberadaan orang asing	1. SK Tim Pendataan Penjamin Orang Asing Nomor: W.30.IMI.IMI.2-GR.04.02-478 Tahun 2023 2. Hasil pembahasan rapat Tim Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing 3. Tabel Penjamin Virtual Orang Asing

**TARGET KINERJA**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	KET / LAMPIRAN
1.	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	Diimplementasikannya layanan Paspor Online pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor Online secara Rotuahkan Saragih, berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	1. Penerapan Paspor Online	1. Laporan Implementasi beserta dokumentasi
2.	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan Pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	1. Pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i> )	1. Dokumen Hasil Pendataan
3.	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Terpatuhinya regulasi penjamin orang asing oleh penjamin dan orang asing	Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing	1. Pelaksanaan pendataan penjamin orang asing 2. Pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah	1. Hasil pendataan penjamin orang asing 2. Laporan hasil pengecekan keberadaan penjamin orang asing di daerah

**TARGET KINERJA**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**

NO.	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	KET / LAMPIRAN
1.	<u>Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman</u>	Diimplementasikannya layanan Paspor Online pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan Paspor Online secara berkelompok dalam melakukan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	1. <u>Penyampaian identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor Online</u>	1. <u>Laporan identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor Online</u>
2.	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan Pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	Adanya informasi dan data tentang Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	1. <u>Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected</u>	1. <u>Dokumen hasil Pendataan</u>
3.	<u>Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya</u>	<u>Terpatuhinya regulasi penjamin orang asing oleh penjamin dan orang asing</u>	<u>Terselenggaranya data penjamin virtual bagi orang asing dan kegiatannya yang memerlukan keberadaan orang asing</u>	1. <u>Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian</u>	1. <u>Dokumen hasil pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian</u>

#### 4. Penghargaan

Pada akhir Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke memperoleh 2 Penghargaan yaitu: Penghargaan Pelayanan Keimigrasian Terbaik dan Penghargaan Penatausahaan BMN Terbaik dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam memberikan pelayanan yang terbaik.



*Penyerahan penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua*

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 3,96 indeks dengan capaian 121,85%;
    - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 3,85 indeks dengan capaian 123%
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 3,94 dengan capaian 125,88%
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.180.845.914 atau 99,52% dari total anggaran sebesar Rp. 9.224.693.000;
3. Realisasi PNBP tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.034.750.000 atau 277,19% dari target sebesar Rp. 373.300.000;
4. Pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke memperoleh 2 Penghargaan yaitu: Penghargaan Pelayanan Keimigrasian Terbaik dan Penghargaan Penatausahaan BMN Terbaik dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
5. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, yaitu: belum dilakukan upgrade jenis layanan prioritas agar

tidak terlalu berdampak saat terjadi gangguan jaringan internet yang terjadi di Kabupaten Merauke, pemberian Pos Lintas Batas pada pos perbatasan yang kurang maksimal dikarenakan tidak lagi strategis dan jarak pos dengan titik perbatasan yang jauh sehingga menyebabkan pelintas tidak bisa melaporkan diri di Pos Imigrasi saat melakukan perlintasan agar dilakukan pemindahan tempat pemeriksaan lintas batas tradisional pada daerah perlintas WN PNG dekat dengan titik perlintasan, banyaknya titik-titik perlintasan yang tidak legal sehingga sulit untuk melakukan pengawasan terhadap perlintasan. Kemudian sarana dan prasarana yang masih belum memadai seperti perangkat PC, laptop, printer, maupun aplikasi berbayar seperti Canva, Photoshop, dan lain-lain;

6. Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke kurang mencukupi dibanding dengan luasnya wilayah kerja, penambahan pegawai terakhir pada tahun anggaran 2022 hanya mendapat sebanyak 1 (satu) orang dengan formasi Pelaksana/Pemula. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mendapatkan bimbingan teknis atau sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi keimigrasian.

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, berikut saran terhadap kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Merauke:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang tugas pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke;
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas internet ke layanan prioritas mengingat seringnya terjadi penurunan kualitas jaringan internet oleh provider internet sehingga menghambat pekerjaan;
3. Untuk dilakukan pemindahan tempat pemeriksaan lintas batas tradisional mengingat terdapat pos perbatasan yang kurang maksimal dikarenakan tidak lagi strategis dan jarak pos dengan titik perbatasan yang jauh sehingga menyebabkan pelintas tidak bisa melaporkan diri di Pos Imigrasi saat melakukan perlintasan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Togol Situmorang  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Papua

  
Anthonius Mathius Ayorbaba  
NIP. 18710515 199610 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Merauke

  
Togol Situmorang  
NIP. 19650412 199103 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	Rp. 2.250.915.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.250.915.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 7.246.353.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7.246.353.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Papua

  
Anthonius Mathius Ayorbaba  
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Merauke

  
Togol Situmorang  
NIP. 19650412 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Togol Situmorang

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Merauke

 Togol Situmorang  
NIP. 19650412 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulhamsyah

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius M. Ayorbaba

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

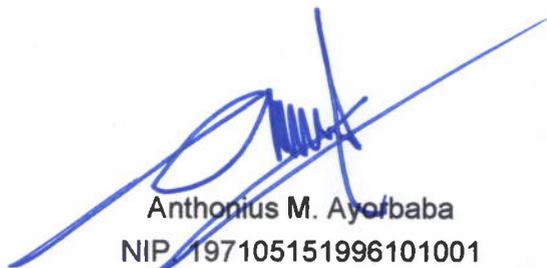
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

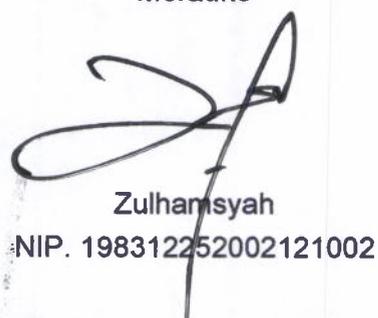
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Papua

  
Anthonius M. Ayorbaba  
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Merauke

  
Zulhamsyah  
NIP. 198312252002121002

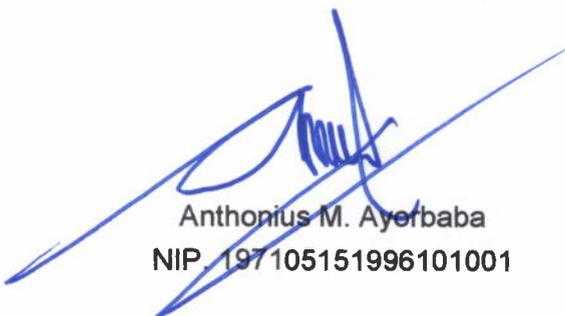
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

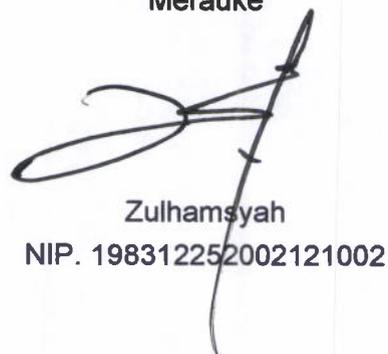
Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.495.878.000</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.495.878.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 7.926.029.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7.926.029.000

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Papua

  
Anthonius M. Ayerbaba  
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Merauke

  
Zulhamsyah  
NIP. 198312252002121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulhamsyah

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 16 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Merauke

Zulhamsyah  
NIP. 198312252002121002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH PAPUA

# Piagam Penghargaan

Nomor : W.30.290.PR.01.04 Tahun 2023

Diberikan kepada

## **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**

Sebagai

### **SATUAN KERJA DENGAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN TERBAIK**

Jayapura, 18 Desember 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, S.H., M.Si.**  
NIP. 197105151996101001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH PAPUA

# Piagam Penghargaan

Nomor : W.30.290.PR.01.04 Tahun 2023

Diberikan kepada

## **KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE**

Sebagai

### **SATUAN KERJA DENGAN PENATAUSAHAAN BMN TERBAIK**

Jayapura, 18 Desember 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA, S.H., M.Si.**  
NIP. 197105151996101001

